

**ANALISIS KELAYAKAN BUKU TEKS PELAJARAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS VII KURIKULUM 2013**

Hidayatul Wakhidah dan Deny Setiawan

PPs UNIMED, Universitas Negeri Medan

Email : hida.uny.07@gmail.com, geodeny@ymailcom

Abstract: This study is aimed to describe the feasibility of civics textbook for seventh grade in Curriculum 2013 in terms of aspect of the content/material, the presentation based on a scientific approach, the presentation based on an authentic assessment, language, and graphic and also factors cause of publication of civics textbook which has not appropriate with the demands of Curriculum 2013. The problems is discussed in this study are how feasibility of civics textbook for seventh grade in Curriculum 2013 reviewed by those various aspects. This study is a descriptive content analysis. Samples were taken by purposive sampling technique which is civics textbook for seventh grade in Curriculum 2013. Data was collected by questionnaire, documentation, interviews, and literature technique. Data were analyzed by descriptive statistical techniques, statistical hypothesis with one sample t test, and analysis of qualitative. The results showed: (1) some aspects of the content / material in the textbook are still in need of improvement, (2) textbooks generally has not enough to encourage the learning activities carried out by the scientific approach, (3) component of authentic assessment has been accommodated in the book, (4) some aspects of language are still need of improvement, (5) some aspects of the graphics are still need of improvement, (6) the factors that cause the emergence in the problem of the book are compilation of the textbook is still trapped on cognitive aspects, civics used as a tool to perpetuate power, and the difficulties to implement book valuation with multilevel mechanism. The conclusions acquired in this study are: (1) aspects of conformity contents/ materials and participation skills have not complied the feasibility standards, while civic knowledge, intellectual skills, and civic dispositons have complied the the feasibility standard, (2) aspects of the scientific approach has not complied the feasibility standard, (3) aspects of authentic assessment has complied the feasibility standard, (4) aspects of language has not complied the feasibility standard, (5) aspect of graphics has not complied the feasibility standard, and (6) the factors that cause the emergence in the problem of the book are compilation of the textbook is still trapped on cognitive aspects, civics used as a tool to perpetuate power, and the difficulties to implement book valuation with multilevel mechanism.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan buku teks pelajaran PPKn Kelas VII Kurikulum 2013 ditinjau dari aspek isi/materi, penyajian berdasarkan pendekatan *scientific*, penyajian berdasarkan penilaian autentik, bahasa, dan grafika serta faktor-faktor penyebab terbitnya buku teks pelajaran PPKn yang belum sesuai dengan

tuntutan Kurikulum 2013. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan buku teks pelajaran PPKn Kelas VII Kurikulum 2013 ditinjau dari berbagai aspek tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis isi (*content analysis*). Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu buku teks pelajaran PPKn Kelas VII Kurikulum 2013. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Data penelitian dianalisis dengan teknik statistik deskriptif, hipotesis statistik dengan uji t satu sampel, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) beberapa aspek isi/ materi dalam buku teks masih membutuhkan perbaikan, (2) buku teks pelajaran secara umum belum cukup mendorong kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan *scientific*, (3) komponen penilaian autentik telah diakomodir dalam buku, (4) beberapa aspek bahasa masih membutuhkan perbaikan, (5) beberapa aspek grafika masih membutuhkan perbaikan, serta (6) faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan buku tersebut adalah penyusunan buku teks masih terjebak pada aspek kognitif, PPKn digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, dan sulitnya menerapkan penilaian buku dengan mekanisme bertingkat. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) aspek kesesuaian isi/ materi dengan kurikulum dan keterampilan partisipasi belum memenuhi standar kelayakan, sementara pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan intelektual, dan karakter kewarganegaraan telah memenuhi standar kelayakan, (2) aspek pendekatan *scientific* belum memenuhi standar kelayakan, (3) aspek penilaian autentik telah memenuhi standar kelayakan, (4) aspek bahasa belum memenuhi standar kelayakan, (5) aspek grafika belum memenuhi standar kelayakan, dan (6) faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan buku tersebut adalah penyusunan buku teks masih terjebak pada aspek kognitif, PPKn digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, dan sulitnya menerapkan penilaian buku dengan mekanisme bertingkat.

Kata kunci : buku teks, PPKn, kurikulum 2013

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah mengganti Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menghendaki agar pendidikan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ciri ini yang

membedakan Kurikulum 2013 dengan kurikulum yang ada sebelumnya, yaitu: (1) pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri berupa afektif, kognitif, dan psikomotor berkembang secara optimal, (2) proses pembelajaran terdiri atas lima kegiatan yang dikenal dengan pendekatan *scientific*, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring, serta (3) penilaian dilakukan berdasarkan indikator - indikator

pencapaian hasil belajar, baik pada domain kognitif, afektif, maupun psikomotor/ penilaian autentik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012: 25-26).

Perubahan kurikulum ini dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen pendidikan yang lain (Mulyasa, 2013: 6). Salah satu komponen yang paling terkena imbas dari perubahan kurikulum adalah buku teks pelajaran. Hal ini dikarenakan kurikulum merupakan acuan utama dalam pengembangan buku teks pelajaran. Dalam kurikulum disebutkan tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi - kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa. Isi buku teks pelajaran merupakan hasil analisis dan uraian yang perlu diketahui siswa untuk dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan (Sitepu, 2005: 120-121).

Buku teks pelajaran yang beredar di Kurikulum 2006 digantikan oleh buku teks pelajaran Kurikulum 2013. Buku teks pelajaran baru ini, memiliki perbedaan dengan buku teks pelajaran kurikulum sebelumnya. Artinya, buku teks pelajaran yang beredar idealnya memiliki ciri sesuai Kurikulum 2013, diantaranya: (1) berisi materi dengan aspek kompetensi berimbang baik kognitif, afektif, dan psikomotor, (2) mendorong proses pembelajaran dengan pendekatan *scientific*, dan (3) mendorong penilaian hasil belajar dilakukan secara autentik.

Buku teks pelajaran Kurikulum 2013 di jenjang SD hanya ditujukan untuk kelas I dan kelas IV, jenjang SMP untuk kelas VII, dan jenjang SMA untuk kelas X. Khusus untuk jenjang SMP kelas VII, buku teks pelajaran Kurikulum 2013 yang telah diterbitkan di antaranya buku IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKn. Buku teks pelajaran PPKn umumnya

men-dapatkan sorotan yang berbeda jika dibandingkan dengan buku teks pelajaran yang lain. Hal ini dikarenakan, sejarah menunjukkan bahwa buku teks pelajaran PPKn tidak berisi pesan kurikulum, tetapi berisikan pesan dan kepentingan rezim penguasa dengan sajian sangat tidak menarik dan formalistik. Materi-materi yang diajarkan cenderung berbentuk hafalan/ kognitif, seperti hafalan butir-butir tafsir Pancasila (Samsuri, 2011: 2).

Buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013, idealnya memiliki ciri sesuai Kurikulum 2013, *pertama*, berisi materi dengan aspek kompetensi berimbang baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Kompetensi berimbang ini dalam PPKn dikenal dengan komponen paradigma baru. Terkait dengan paradigma baru, Cholisin (2005: 3) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pa-radigma baru ini sering dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan yang bermutu. Dikatakan bermutu karena memiliki pengetahuan ke-warganegaraan (*civic knowledge*) yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat demokratis, memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang mampu untuk mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara dan masyarakat kewargaan.

Selama ini, buku teks pelajaran PPKn sebagai buku wajib di sekolah cenderung menggambarkan konsep yang kuat tentang ideologi negara, konstitusi negara, dan materi lain sesuai narasi menurut tafsir rezim yang berkuasa (Kalidjernih dalam Sunarso, 2011: 66). Materi dalam buku teks PPKn juga masih didominasi oleh aspek kognitif. Hasil penelitian Winarno Narmoatmojo menemukan bahwa rata-rata komposisi materi PPKn

untuk aspek kognitif (pengetahuan) mencapai angka 69,43%, aspek sikap (afektif) sebesar 12%, dan aspek perilaku (psikomotor) sebesar 20,17% (Narmoatmojo, 2009: 4).

Kedua, buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013, mendorong proses pembelajaran dengan pendekatan *scientific*. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, pendekatan *scientific* menuntut kegiatan aktif siswa untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring atas apa yang mereka pelajari. Sayangnya, bahan ajar dalam buku teks pelajaran PPKn belum memberikan pemahaman dan peningkatan keterampilan berpikir yang serasi dengan tujuan pembelajaran PPKn. Kandungan buku teks pelajaran PPKn juga tidak banyak memiliki muatan pola pembelajaran kontekstual seperti model pemecahan masalah, inquiri sosial, tugas observasi lapangan, dan studi dokumen (Abdulkarim, 2005).

Ketiga, buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013 menyajikan penilaian hasil belajar autentik. Penilaian ini meng-kombinasikan pengetahuan, ke-mampuan, dan sikap dalam kriteria situasi kehidupan profesional (Muchtar, 2010: 73). Selama ini, evaluasi dalam buku teks pelajaran PPKn masih terjebak pada tataran data, fakta, dan konsep yang sifatnya umum (kognitif tingkat rendah). Penyajiannya belum sampai pada fakta dan konsep yang sifatnya khusus, aktual, dan kontekstual dengan kadar kompetensi taksonomi yang tinggi. Hal ini berakibat, 93% guru PPKn hampir seluruhnya menekankan penilaian hanya pada aspek kognitif, sedangkan 7% lainnya

merupakan gabungan dari kognitif dan afektif.

Buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013, idealnya memiliki tiga komponen seperti yang telah disebutkan di atas. Sebagai pelengkap agar dapat disebut sebagai buku teks pelajaran yang baik, buku teks pelajaran PPKn Kurikulum 2013 hendaknya juga memenuhi kriteria dari aspek bahasa dan kegrafikaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan bahwa buku teks pelajaran harus memenuhi kelayakan isi/ materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Ketiga komponen yang telah disebutkan sebelumnya hanya memenuhi kriteria buku teks pelajaran dari aspek isi/ materi dan penyajian.

Keempat, ditinjau dari segi bahasa. Buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013, hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan materi buku teks pelajaran dari pengembang buku kepada siswa. Sebagai alat komunikasi, bahasa yang tepat dapat memudahkan pemahaman dan menimbulkan atau meningkatkan motivasi belajar (Sitepu, 2005: 123). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan buku teks pelajaran PPKn masih rendah. Sebagian besar siswa (74,2%) tergolong pembaca frustrasi/ gagal, sebagian kecil siswa (20,2%) tergolong pembaca sedang dan instruksional, serta hanya ada 5,6% siswa yang masuk ke dalam pembaca mudah atau independen (Abdulkarim, 2005). Artinya, pilihan bahasa yang digunakan dalam buku teks pelajaran PPKn masih sulit dipahami oleh siswa.

Kelima, ditinjau dari segi kegrafikaan. Grafika buku erat hubungannya dengan kualitas fisik buku. Pembaca cenderung akan melihat tampilan fisik buku sebelum mereka menginginkan dan tertarik untuk melihat lebih jauh isi buku. Buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013 hendaknya memenuhi kriteria aspek grafika yang meliputi ukuran buku, ilustrasi, tata letak, ukuran huruf dan spasi, jenis huruf, serta anatomi buku (Sitepu, 2012: 127-160). Salah satu hasil penelitian Sulistyowati tentang analisis buku teks pelajaran PPKn, menyatakan bahwa kesesuaian ilustrasi pada buku teks pelajaran PPKn masih terdapat banyak kekurangan karena gambar yang disajikan kurang bermanfaat bagi siswa (Sulistyowati, 2011).

Pemberlakuan Kurikulum 2013 diharapkan dapat membawa perubahan pada buku teks pelajaran PPKn, terutama pada buku pokok. Masih ditemukannya permasalahan - permasalahan pada buku teks pelajaran PPKn yang diterbitkan pemerintah, diindikasikan terjadi juga pada buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013. Karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang analisis buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013. Buku teks pelajaran yang akan diteliti terbatas pada buku pokok karena menjadi sumber acuan utama bagi guru dan siswa dalam pembelajaran di kelas. Buku ini juga menjadi acuan bagi penulis atau penerbit buku yang akan menyusun buku pelengkap. Buku teks pelajaran Kurikulum 2013 ini juga telah disebarkan ke sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.

KAJIAN PUSTAKA

Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa “buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti”. Sementara, istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *civic education* atau *citizenship education*. Untuk konteks Indonesia, *civic education* atau *citizenship education* oleh beberapa pakar diartikan secara luas sebagai Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewargaan (Winarno, 2010: 1). Secara terminologis, Cholisin dalam Winarno (2010: 1-2), mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pendapat lain mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 (Somantri dalam Winarno, 2010: 2). Sedangkan Udin Winataputra mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebiasaan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok

serta disiplin ilmu lain yang relevan, secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan (Winataputra dalam Winarno, 2010 : 2).

Dari berbagai pendapat di atas, buku teks pelajaran PPKn adalah (1) buku standar yang disusun dan ditulis oleh para pakar di bidang ilmu PPKn, (2) digunakan sebagai pegangan pokok atau pelengkap dalam pembelajaran PPKn, (3) merupakan sumber pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti dalam pembelajaran PPKn, (4) fokus materinya adalah mengatur hubungan (hak dan kewajiban) antara warga negara dengan negara agar menciptakan warga negara yang dapat diandalkan, dan (5) bentuknya berupa kumpulan lembaran kertas terjilid atau dalam bentuk BSE.

Fungsi buku teks pelajaran PPKn adalah: (1) menyediakan sumber belajar yang rapi, kaya, dan variatif sesuai kurikulum guna membentuk multidimensional *citizenship*, (2) menyajikan pokok masalah yang kaya dan variatif guna mencapai *desirable personal quality*, (3) menyediakan metode belajar yang variatif untuk mendorong siswa aktif berpartisipasi, kritis, kreatif, dan berbudaya *civic culture*, (4) menyajikan evaluasi autentik sesuai dengan kehidupan nyata siswa, meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan.

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa buku teks pelajaran

harus memenuhi kelayakan isi/ materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Ketentuan ini berlaku bagi semua buku teks pelajaran termasuk PPKn. Buku teks pelajaran PPKn yang berlaku dalam Kurikulum 2013 harus memenuhi empat syarat kelayakan tersebut. Selain itu, buku teks pelajaran PPKn juga harus mencerminkan ciri sesuai Kurikulum 2013, yaitu: (1) memungkinkan potensi diri berupa afektif, kognitif, dan psikomotor berkembang secara optimal/ kompetensi berimbang, (2) mendorong proses pembelajaran dengan pendekatan *scientific*, dan (3) penilaian pencapaian hasil belajar dilakukan pada domain kognitif, afektif, maupun psikomotor/ penilaian autentik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012: 25-26).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis isi (*content analysis*). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian pada suatu periode tertentu (Mukhtar, 2013: 11). Informasi itu menggambarkan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya. Sedangkan analisis isi (*content analysis*) dimaksudkan untuk membuat inferensi/ kesimpulan yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah mengenai buku, majalah, koran, undang-undang, laporan dan lain-lain (Mukhtar, 2013: 34-35). Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana, berapa banyak, dan sejauh mana kelayakan buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013.

Penelitian deskriptif analisis isi merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan populasi, tetapi hanya memiliki sampel penelitian. Sampel

dalam penelitian deskriptif disebut dengan sampel teoretis (Mukhtar, 2013: 23). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu penetapan sampel penelitian berdasarkan tujuan atau kepentingan tertentu (Mukhtar, 2013: 95). Sampel dalam penelitian deskriptif ini adalah buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013 karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan kelayakan buku tersebut dari segi isi/materi, penyajian (*pendekatan scientific* dan penilaian autentik), bahasa, dan grafika.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Angket diisi oleh guru PPKn kelas VII untuk memperoleh data tentang kelayakan isi/ materi dan penyajian, ahli bahasa untuk

mengetahui kelayakan bahasa, dan ahli grafika untuk mengetahui kelayakan dari segi grafika. Dokumentasi dilakukan dengan membuat catatan penting berkaitan dengan penilaian buku. Wawancara dilakukan kepada ahli bahasa dan ahli grafika untuk mengetahui deskriptor bahasa dan grafika buku teks yang sesuai untuk siswa kelas VII. Sementara studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber atau referensi lain yang berkaitan dengan buku teks pelajaran. Data hasil penelitian yang diperoleh melalui instrumen angket merupakan data kuantitatif. Data ini dianalisis secara statistik deskriptif dan pengujian hipotesis dengan “*student’s T* statistik” (uji t satu sampel). Sementara data hasil dokumentasi, wawancara dan studi pustaka, akan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap buku teks pelajaran PPKn Kelas VII

Kurikulum 2013 terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penelitian terhadap Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas VII Kurikulum 2013

No	Aspek Kelayakan	Harapan	Kenyataan
1	Isi/ materi	<p>a. Memenuhi aspek kesesuaian isi/ materi dengan kurikulum</p> <p>b. Memenuhi komponen paradigma baru (<i>civic knowledge, intellectual skills, participation skills, dan civic dispositions</i>)</p>	<p>a. Aspek kedalaman materi, keluasaan materi, keterpaduan pokok bahasan, keseimbangan materi, dan alokasi waktu belum sesuai dengan kurikulum.</p> <p>b. Komponen <i>civic knowledge, intellectual skills, dan civic dispositions</i> telah memenuhi standar kelayakan, sementara komponen <i>participation skills</i> masih membutuhkan perbaikan.</p>

2	Pendekatan <i>scientific</i>	Mendukung proses pembelajaran dengan 5M (mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring)	<p>a. Kegiatan menanya masih didominasi guru dengan pertanyaan berpikir tingkat rendah.</p> <p>b. Menalar masih terbatas pada mengumpulkan ide, belum sampai tahap konstruktivistik.</p> <p>c. Penyajian kegiatan mencoba masih sangat terbatas</p>
3	Penilaian auentik	Penilaian hasil belajar menuntut partisipasi nyata siswa, baik kognitif, afektif, dan psikomotor secara terpadu.	Telah diakomodir dalam buku, penyajian di akhir setiap bab dalam bentuk uji kompetensi (kognitif), penilaian afektif, dan praktik kewarganegaraan (psikomotor).
4	Bahasa	Memenuhi aspek bahasa dan keterbacaan	<p>a. Beberapa aspek bahasa seperti kelugasan bahasa, struktur kalimat, komunikatif, mendorong berpikir kritis, dan keruntutan alur berpikir masih membutuhkan perbaikan.</p> <p>b. Beberapa istilah mental proses digunakan tanpa diikuti material prosesnya.</p> <p>c. Gaya <i>hit and run</i> masih ditemukan sehingga pembahasan suatu pokok bahasan menjadi kurang runtut.</p>
5	Grafika	<p>a. Memenuhi kualitas fisik buku</p> <p>b. Gambar sampul dan isi <i>hand made</i> (buatan tangan)</p>	<p>a. Beberapa aspek grafika seperti perbandingan ilustrasi dengan teks, kesesuaian ilustrasi dengan teks, dan anatomi sampul belakang masih membutuhkan perbaikan.</p> <p>b. Gambar sampul dan gambar isi sebagian besar adalah gambar jadi.</p>

Pemberlakuan Kurikulum 2013 diharapkan dapat membawa perubahan pada buku teks pelajaran PPKn, terutama buku pokok agar menjadi lebih baik. Sayangnya, masih ditemukan juga buku teks pelajaran PPKn yang belum sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, penyusunan buku teks pelajaran PPKn masih terjebak pada aspek kognitif yang menyebabkan kompetensi berimbang dalam Kurikulum 2013 belum tercapai. Pada buku teks pelajaran PPKn Kelas VII Kurikulum 2013, komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan intelektual (*intellectual skills*) telah diakomodir di dalam buku teks pelajaran, tetapi komponen keterampilan partisipasi (*participation skills*) belum cukup memberikan bekal kepada siswa untuk memiliki keterampilan partisipasi. Meskipun sebagian besar komponen keterampilan intelektual (*intellectual skills*) telah diakomodir di dalam buku teks tersebut, tetapi dominasinya masih kepada kemampuan berpikir tingkat rendah (*lower order thinking skills*). Idealnya, buku teks pelajaran PPKn Kurikulum 2013 memiliki ciri kompetensi berimbang, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen kognitif lebih mendominasi dibandingkan komponen keterampilan.

Kedua, PPKn mengalami penyimpangan visi dan misi karena dijadikan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan (Sunarso, 2011: 3). Kebijakan kurikulum bukanlah sesuatu yang netral karena merupakan hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pendidik profesional yang saling memperebutkan kepentingan. Keadaan ini

menjadi relevan ketika perjalanan PPKn dikembangkan sesuai kepentingan pemerintah (Samsuri, 2013: 3).

Tiga, sulitnya menerapkan penilaian buku teks pelajaran dengan menggunakan mekanisme bertingkat karena membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Akibatnya, terdapat beberapa bagian buku yang belum memenuhi standar kelayakan. Mengingat buku yang dinilai jumlahnya sangat banyak, maka proses penilaian tidak dapat dilakukan tahap demi tahap sebagaimana idealnya. Penilaian yang ideal adalah setiap penilai membaca secara detail kalimat demi kalimat, menandai yang salah/kurang, memberikan saran perbaikan, menunjukkan sumber - sumber penunjang yang relevan, menyampaikan kekeliruan pada penerbit/pengarang, meminta penerbit/pengarang untuk melakukan perbaikan, dan hasil perbaikan dinilai ulang oleh tim penilai. Prosedur yang sangat panjang ini mengandung kelemahan di mana penilaian yang dilakukan menjadi kurang akurat dan tidak teridentifikasi dengan baik jika ada kesalahan pada buku yang dinilai (Supriadi, 2001: 191).

SIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kelayakan buku teks pelajaran PPKn Kelas VII Kurikulum 2013, yaitu: *Satu*, ditinjau dari segi isi/ materi, isi/ materi buku teks pelajaran secara umum belum memenuhi standar kesesuaian isi/ materi dengan kurikulum. Ditinjau dari komponen paradigma baru PPKn, komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan intelektual (*intellectual skills*) secara umum telah memenuhi

standar kelayakan karena sebagian besar substansi inti komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan intelektual (*intellectual skills*) telah terakomodir dalam buku teks pelajaran tersebut. Hanya saja, keterampilan kognitif tingkat rendah (*lower order thinking skill*) lebih mendominasi dibandingkan keterampilan kognitif tingkat tinggi (*higher order thinking skill*). Komponen keterampilan partisipasi (*participation skills*) secara umum belum memenuhi standar kelayakan. Sementara, komponen karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang ingin ditanamkan dalam diri siswa agar dilaksanakan (*doing*) dan menjadi kebiasaan (*habbit*) telah diakomodir oleh buku teks tersebut.

Dua, ditinjau dari aspek penyajian berdasarkan pendekatan *scientific*, buku teks pelajaran secara umum belum cukup mendorong kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan *scientific*. Metode pembelajaran yang mendorong kegiatan pembelajaran *scientific* masih disajikan secara terbatas. Metode pembelajaran yang sudah ditampilkan antara lain portofolio, *problem solving*, dan simulasi.

Tiga, ditinjau dari aspek penyajian berdasarkan penilaian autentik, buku teks pelajaran secara umum telah memenuhi standar kelayakan dari segi penyajian berdasarkan penilaian autentik. Dalam buku teks pelajaran ini dapat ditemukan penilain afektif untuk mengevaluasi sikap, uji kompetensi untuk mengevaluasi pengetahuan, dan praktik kewarganegaraan untuk mengevaluasi keterampilan. Semuanya disajikan secara komprehensif di dalam sebuah penugasan di akhir setiap bab yang disajikan.

Empat, ditinjau dari aspek bahasa, buku teks pelajaran PPKn secara umum belum memenuhi standar kelayakan dari segi bahasa dan keterbacaan.

Lima, ditinjau dari segi grafika, buku teks pelajaran PPKn secara umum belum memenuhi standar kualitas fisik buku yang baik.

Enam, ada beberapa faktor penyebab munculnya buku teks pelajaran PPKn yang belum sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, yaitu: (1) penyusunan buku teks pelajaran PPKn masih terjebak pada aspek kognitif, (2) PPKn sering mengalami penyimpangan visi dan misi karena dijadikan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Kebijakan kurikulum merupakan hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pendidik profesional yang saling memperebutkan kepentingan sehingga dengan mudah, materi PPKn dikembangkan sesuai kepentingan pemerintah, dan (3) sulitnya menerapkan penilain buku teks pelajaran dengan menggunakan mekanisme bertingkat karena membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tenaga.

Dari simpulan penelitian yang telah disebutkan di atas, ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan buku teks pelajaran PPKn di waktu yang akan datang. *Pertama*, bagi sekolah, guru, dan siswa, sebaiknya lebih bijak dalam menggunakan buku teks pelajaran PPKn dengan cara melengkapinya dengan berbagai sumber belajar yang lain. Hal ini bertujuan untuk melengkapi dan menutupi kekurangan dari buku teks yang digunakan serta melatih guru dan siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar (multi sumber).

Kedua, bagi penulis/ penerbit buku, penyusunan buku teks pelajaran PPKn lebih memperhatikan batang tubuh (*body of knowledge*) dari PPKn itu sendiri agar tidak hilang akar keilmuannya. Kegiatan dalam pendekatan *scientific* seperti menanya, menalar, dan mencoba/*experimenting* lebih banyak dimunculkan. Aspek penilain kognitif, sebaiknya memperhatikan kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis. Aspek kebahasaan dan grafika sebaiknya dikemas semenarik mungkin, disesuaikan dengan perkembangan siswa, dan mampu memotivasi siswa untuk mempelajari buku tersebut hingga tuntas.

Tiga, bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam menentukan buku teks pelajaran PPKn yang layak, terdapat berbagai macam aspek yang harus diperhatikan dan membutuhkan proses penilaian yang panjang. Jika buku teks pelajaran dan aspek-aspeknya yang dinilai jumlahnya banyak dan mendetail, sedangkan mereka kekurangan biaya, waktu, dan tenaga, maka mereka dapat meminta tambahan sumber daya dari pemerintah baik dana maupun manusia.

Empat, bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan, buku teks pelajaran PPKn sebaiknya benar-benar memuat pesan untuk membentuk warga negara yang dapat diandalkan (*desirable personal quality*) sebagaimana tuntutan konstitusi nasional.

DAFTAR RUJUKAN

Abdulkarim, Aim. 2005. *Analisis Buku Teks PPKn dan Implikasinya dalam Pengembangan Bahan Ajar yang Dapat Memberdayakan Keterampilan Berpikir Siswa*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Program

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Cholisin. 2005. *Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Makalah disampaikan pada *Training of Trainers (ToT) Nasional Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan* yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) Dirjen Dikdasmen Depdiknas, Asrama Haji Surabaya, tanggal 3 – 17 Mei 2005 (tahap I) dan tanggal 6 – 20 Mei 2005 (tahap II).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Bahan Uji Publik Kurikulum 2013, (<http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com>, diakses 27 Januari 2014).

Muchtar, Hartati. 2010. Penerapan Penilaian Autentik dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Penabur*. No.14/ Tahun ke-9/ Juni 2010, (<http://www.bpkpenabur.or.id>, diakses 30 April 2013).

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.

Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Narmoatmojo, Winarno. 2009. *Perkembangan Mutakhir Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*, (<http://winarno.staff.fkip.uns.ac.id>, diakses 2 Mei 2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

- Pendidikan. 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Samsuri. 2013. *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013*. Makalah disampaikan pada kuliah umum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 15 September 2013.
- Samsuri. 2011. *Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Kompetensi Warga Negara*. Makalah disampaikan dalam kajian kuliah umum di Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 9 Mei 2011 dan pernah disajikan dalam kajian mandiri kewarganegaraan di Program Studi PIPS, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Semester Genap 2008/2009.
- Sitepu, B.P. 2005. Memilih Buku Pelajaran. *Jurnal Pendidikan Penabur*, No 04/ Tahun IV/ Juli 2005, (<http://www.bpkpenabur.or.id>, diakses 14 Februari 2013).
- Sulistiyowati. 2011. *Analisis Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kota Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sunarso. 2011. *Laporan Penelitian: Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, Kajian Tentang Perkembangannya Pada Tiga Orde*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, (<http://staff.uny.ac.id>, diakses tanggal 24 Desember 2013
- Supriadi, Dedi. 2001. *Anatomi Buku Sekolah Di Indonesia, Problematik Penilaian, Penyebaran, dan Penggunaan Buku Pelajaran, Buku Bacaan, dan Buku Sumber*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Winarno.2010. *Merekonfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia sebagai Pendidikan Kebangsaan dan Pendidikan Demokrasi*. Makalah disajikan dalam Internship Nasional Dosen dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan, Kerja Sama Deputi Seswapres RI bidang politik dengan MKU UNS, Solo, tanggal 17 April 2010.